

DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v7i6><https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received: 18 September 2026 | Revised: 27 September 2026 | Accepted: 17 Oktober 2026

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai Instrumen Kebijakan Publik dalam Kerangka Hubungan Internasional: Studi Ketahanan Pangan di Kabupaten Sidoarjo

Ardi Dharma Putra¹, Asih Purwanti²¹Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia, ardidharmaputra234@gmail.com²Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia, a.purwanti@ub.ac.idCorresponding Author: ardidharmaputra234@gmail.com¹

Abstract: *The Free Nutritious Meal (MBG) program extends beyond food provision, encompassing basic needs fulfillment, nutritional protection, and community resilience. This study analyzes MBG implementation in Sidoarjo Regency through human and food security lenses, identifying sustainability factors using Japan's kyūshoku system as a benchmark. Employing a qualitative case study, primary data were gathered through in-depth interviews and observations at SPPG Gedangan, while Japan's kyūshoku system was used as a literature-based analytical reference. Secondary data included policy documents, reports, and literature. Data were analyzed using Miles et al.'s interactive model, incorporating data reduction, display, and conclusion drawing, alongside triangulation. Findings reveal that SPPG Gedangan operates through structured mechanisms of menu planning, procurement, quality control, production, distribution, and monitoring. From a human security perspective, food safety controls reflect the protection dimension, while multi-stakeholder involvement involving government, local suppliers, schools, and communities indicates elements relevant to the empowerment dimension. From a food security perspective, it addresses availability, access, utilization, and stability, though limited kitchen capacity restricts wider coverage. Compared to Japan's kyūshoku system, MBG shares nutritional objectives but needs stronger regulatory frameworks, cross-sectoral coordination, and nutritional education. Ultimately, MBG demonstrates significant potential as a strategic instrument to reinforce local human and food security, while fostering sustainable nutritional welfare and community resilience among student beneficiaries.*

Keywords: *Free Nutritious Meal Program, Food Security, Human Security, Kyūshoku, Sidoarjo*

Abstrak: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya mencakup penyediaan makanan, tetapi juga pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan gizi, dan ketahanan masyarakat. Penelitian ini menganalisis implementasi MBG di Kabupaten Sidoarjo melalui perspektif keamanan manusia dan ketahanan pangan, serta mengidentifikasi faktor keberlanjutan dengan menggunakan sistem *kyūshoku* Jepang sebagai tolok ukur. Penelitian ini menggunakan studi

kasus komparatif kualitatif, dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi di SPPG Gedangan. Data sekunder meliputi dokumen kebijakan, laporan, dan literatur. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles et al. yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPPG Gedangan beroperasi melalui mekanisme terstruktur yang meliputi perencanaan menu, pengadaan, pengendalian mutu, produksi, distribusi, dan pemantauan. Dari perspektif keamanan manusia, program ini memberikan perlindungan melalui pengendalian keamanan pangan dan pemberdayaan melalui kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah, pemasok lokal, dan masyarakat. Dari perspektif ketahanan pangan, program ini mencakup aspek ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas, meskipun keterbatasan kapasitas dapur membatasi cakupan yang lebih luas. Dibandingkan dengan sistem *kyūshoku* Jepang, MBG memiliki kesamaan dalam tujuan pemenuhan gizi, tetapi memerlukan penguatan kerangka regulasi, koordinasi lintas sektor, dan pendidikan gizi. Pada akhirnya, MBG menunjukkan potensi yang signifikan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat keamanan manusia dan ketahanan pangan lokal, sekaligus mendorong kesejahteraan gizi berkelanjutan dan ketahanan masyarakat di kalangan penerima manfaat siswa.

Kata Kunci: Program Makan Bergizi Gratis, Ketahanan Pangan, Keamanan Manusia, *Kyūshoku*, Sidoarjo

PENDAHULUAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dipahami sebagai instrumen kebijakan publik yang tidak hanya berkaitan dengan penyediaan makanan bagi peserta didik, tetapi juga dengan upaya negara menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, kualitas hidup, dan ketahanan sosial masyarakat. Dalam perspektif hubungan internasional, isu pangan tidak lagi dapat dipandang semata sebagai persoalan produksi dan distribusi, melainkan sebagai bagian dari keamanan insani (human security) yang menempatkan manusia sebagai pusat perhatian. United Nations Development Programme (UNDP, 1994) menegaskan bahwa keamanan insani menggeser fokus dari keamanan negara ke keamanan manusia, dengan perhatian pada kerentanan yang mengancam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks yang sama, Food and Agriculture Organization (FAO, 2008) menjelaskan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi ketika semua orang, pada setiap waktu, memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk menjalani hidup yang aktif dan sehat. World Health Organization (WHO, 2020) juga menekankan bahwa makanan sehat dan aman merupakan bagian penting dari kesehatan publik, terutama bagi anak sekolah yang berada pada fase pertumbuhan, pembentukan kebiasaan makan, dan pengembangan kapasitas belajar. Dengan demikian, MBG relevan dibaca bukan hanya sebagai program sosial, tetapi juga sebagai kebijakan yang menyentuh dimensi keamanan manusia, mutu konsumsi, dan perlindungan terhadap kerentanan pangan anak sekolah.

Secara konseptual, literatur ketahanan pangan memperlihatkan bahwa persoalan pangan tidak cukup dijelaskan melalui aspek ketersediaan semata. Food and Agriculture Organization (FAO, 2008) menegaskan empat pilar ketahanan pangan, yaitu availability, access, utilization, dan stability, yang saling terkait dalam menentukan apakah individu benar-benar mampu memperoleh pangan yang layak. Dalam konteks MBG, dimensi tersebut penting karena program tidak hanya harus menyediakan makanan, tetapi juga memastikan makanan itu tersedia secara konsisten, dapat diakses secara merata, dimanfaatkan secara bergizi, dan dipertahankan keberlanjutannya. World Health Organization (WHO, 2020) memperkuat pandangan ini dengan menekankan bahwa sekolah merupakan ruang strategis untuk membentuk kebiasaan makan sehat dan lingkungan pangan yang mendukung kesehatan anak.

Karena itu, kebijakan pangan di sekolah tidak bisa dipisahkan dari upaya membangun pola konsumsi yang aman, seimbang, dan berkelanjutan. Demikian literatur ini menunjukkan bahwa MBG perlu dibaca sebagai kebijakan yang berhubungan langsung dengan keamanan pangan, kesehatan siswa, dan kualitas pelayanan publik di level lokal.

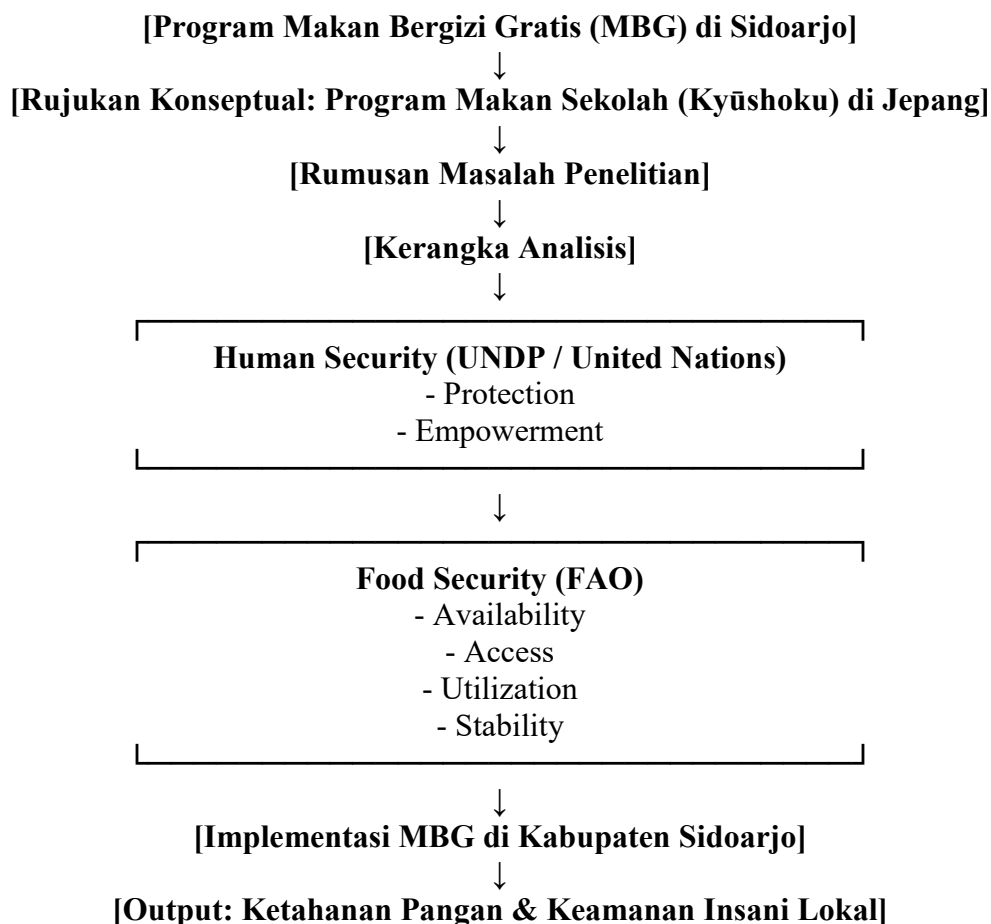
Pada level empiris Indonesia, penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ketahanan pangan di Kabupaten Sidoarjo masih dihadapkan pada persoalan struktural dan operasional. Rustianingsih (2024) menyoroti hambatan tata kelola, koordinasi antaraktor, dan efektivitas program ketahanan pangan di Sidoarjo. Susanti (2019) serta Febrian (2018) memperlihatkan bahwa kondisi ketahanan pangan rumah tangga dan indikator pangan di wilayah tersebut masih berkaitan dengan akses ekonomi, distribusi, dan daya dukung sistem lokal. Prasetyarini et al. (2014) juga menegaskan bahwa penyediaan pangan merupakan fondasi utama dalam penguatan ketahanan pangan daerah. Di sisi lain, studi mengenai MBG oleh Aji (2025), Herdiana (2025), Rahmah et al. (2025), Fatmawati (2025), Tambunan et al. (2025), dan Qomarrullah et al. (2025) memperlihatkan bahwa program ini berhubungan dengan koordinasi pelaksana, kualitas gizi siswa, konsentrasi belajar, produktivitas belajar, serta keberlanjutan pendidikan. Literatur tersebut menunjukkan bahwa MBG telah dikaji dalam kaitannya dengan pembelajaran, kesehatan anak, dan tata kelola pangan di tingkat lokal. Dengan demikian, penelitian ini berdiri di atas percakapan akademik yang sudah ada, tetapi berupaya menghubungkannya secara lebih utuh ke dalam satu kerangka analisis.

Meskipun demikian, studi-studi yang tersedia masih cenderung memisahkan dimensi pangan, kesehatan, dan tata kelola kebijakan ke dalam pembahasan yang berdiri sendiri. Ada penelitian yang menekankan ketahanan pangan daerah, ada yang menyoroti dampak MBG terhadap proses belajar, dan ada pula yang membahas efektivitas implementasi kebijakan secara umum. Celah inilah yang menjadikan penelitian ini penting, sebab MBG sesungguhnya tidak hanya menyangkut distribusi makanan, tetapi juga memperlihatkan bagaimana negara bekerja melindungi kelompok rentan melalui kebijakan yang bersifat preventif, sekaligus bagaimana aktor lokal diberdayakan agar program dapat berjalan berkelanjutan. Dalam konteks itulah pendekatan human security dan food security menjadi relevan untuk dipadukan, di mana human security menekankan aspek perlindungan dan pemberdayaan (United Nations, 2009), sedangkan food security menjelaskan dimensi pemenuhan pangan secara teknis dan operasional (FAO, 2008).

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk membaca MBG sebagai kebijakan publik yang masih dalam proses penguatan implementasi, terutama ketika dikaitkan dengan ketahanan pangan dan keamanan insani di level daerah. Program seperti MBG menarik untuk diteliti karena menyentuh kebutuhan dasar yang dialami langsung oleh peserta didik, keluarga, sekolah, dan pemerintah daerah. Selain itu, program ini juga memperlihatkan bagaimana kebijakan nasional bertemu dengan realitas lokal yang dipengaruhi kapasitas institusi, koordinasi antaraktor, dan ketersediaan sumber daya. Kabupaten Sidoarjo menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji bagaimana MBG diimplementasikan pada konteks lokal serta mengidentifikasi praktik dan hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya.

Novelty penelitian ini terletak pada cara penelitian memosisikan MBG sebagai isu yang bukan hanya administratif, tetapi juga terkait dengan keamanan insani dan ketahanan pangan. Berbeda dari studi-studi sebelumnya yang cenderung membahas program pangan secara sektoral atau dari sisi pendidikan saja, penelitian ini menempatkan MBG dalam kerangka hubungan internasional yang menekankan keterkaitan antara kebijakan publik, keamanan manusia, dan ketahanan pangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai apakah MBG berjalan atau tidak, tetapi juga bagaimana program tersebut berkontribusi terhadap perlindungan gizi, penguatan kapasitas pelaksana, dan keberlanjutan manfaat bagi peserta didik.

Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sidoarjo dapat dipahami melalui perspektif human security dan food security, serta faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat keberlanjutan implementasinya. Adapun tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan MBG di Kabupaten Sidoarjo dalam kerangka ketahanan pangan dan keamanan insani, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat efektivitasnya. Sehingga manfaat penelitian ini secara teoretis mampu memperkaya kajian keamanan insani dan ketahanan pangan, serta secara praktis dapat menjadi dasar penyusunan rekomendasi operasional yang lebih kontekstual bagi pemerintah daerah, sekolah, dan pihak pelaksana program.



Gambar 1. Alur Pemikiran Penelitian

Alur pemikiran ini menunjukkan bahwa penelitian berangkat dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan publik, kemudian dianalisis melalui dua kerangka utama, yaitu human security dan food security. Kedua kerangka tersebut selanjutnya digunakan untuk membaca implementasi MBG di Kabupaten Sidoarjo dengan menjadikan sistem kyūshoku di Jepang sebagai rujukan komparatif. Hasil analisis diharapkan mampu menjelaskan bagaimana kebijakan yang serupa dapat menghasilkan dinamika yang berbeda akibat perbedaan konteks lokal, kapasitas kelembagaan, serta bentuk partisipasi aktor yang terlibat. Dengan alur ini, pembahasan penelitian tidak berhenti pada deskripsi program, tetapi bergerak menuju analisis yang lebih mendalam terkait ketahanan pangan dan keamanan insani di tingkat daerah.

Untuk memperjelas keterkaitan antara kerangka konseptual dan analisis empiris, penelitian ini mengoperasionalkan konsep human security dan food security ke dalam variabel

serta indikator penelitian yang terukur. Operasionalisasi ini penting untuk menjembatani abstraksi teoretis dengan realitas implementasi kebijakan, sehingga analisis terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dilakukan secara sistematis dan komparatif.

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Jenis Variabel	Variabel	Indikator	Operasionalisasi
Independen (X)	Program MBG sebagai kebijakan publik	Implementasi Program	Dilihat dari pelaksanaan distribusi makanan, koordinasi antaraktor, dan mekanisme kerja program di sekolah
Intervening (Z)	Food Security	Availability	Dilihat dari kontinuitas pasokan makanan dan kesiapan penyedia
Intervening (Z)	Food Security	Access	Dilihat dari pemerataan distribusi makanan kepada peserta didik
Intervening (Z)	Food Security	Utilization	Dilihat dari kualitas gizi, keamanan, dan kelayakan konsumsi makanan
Intervening (Z)	Food Security	Stability	Dilihat dari keberlanjutan dan konsistensi pelaksanaan program
Intervening (Z)	Human Security	Protection	Dilihat dari kebijakan, standar, dan jaminan pemerintah terhadap pemenuhan gizi peserta didik
Intervening (Z)	Human Security	Empowerment	Dilihat dari keterlibatan sekolah, masyarakat, dan aktor lokal dalam implementasi program
Dependen (Y)	Ketahanan pangan & keamanan insani lokal	Kondisi gizi & kesejahteraan	Dilihat dari terpenuhinya kebutuhan pangan, meningkatnya perlindungan gizi, dan menguatnya peran aktor lokal dalam mendukung keberlanjutan program

Sebelum tabel ini, kerangka analisis menegaskan bahwa konsep abstrak seperti keamanan insani dan ketahanan pangan perlu diturunkan ke dalam indikator yang dapat diamati secara empiris. Karena itu, variabel independen (X) dalam penelitian ini adalah Program MBG sebagai kebijakan publik, sedangkan variabel intervening (Z) dijelaskan melalui food security dan human security. Variabel dependen (Y) berada pada keluaran yang ingin dicapai, yakni terbentuknya ketahanan pangan dan keamanan insani lokal. Secara keseluruhan, kerangka analisis ini menempatkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan publik yang tidak hanya berfungsi sebagai instrumen distribusi pangan, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan dan pemberdayaan dalam kerangka keamanan insani.

Dengan demikian, kerangka analisis ini menempatkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya sebagai kebijakan distribusi pangan, tetapi sebagai instrumen strategis dalam menjamin perlindungan dan pemberdayaan dalam kerangka keamanan insani. Integrasi antara konsep food security dan human security menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak semata diukur dari tersalurkannya makanan, tetapi dari kemampuan program dalam memastikan akses yang merata, kualitas konsumsi, serta keberlanjutan layanan bagi peserta didik. Dengan menjadikan sistem *kyūshoku* di Jepang sebagai rujukan konseptual, penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan pangan di sekolah memiliki dimensi tata kelola yang kompleks dan kontekstual. Oleh karena itu, kerangka ini tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis, tetapi juga sebagai dasar kritis untuk menilai sejauh mana kebijakan publik mampu berkontribusi terhadap penguatan ketahanan pangan dan keamanan insani secara berkelanjutan di tingkat lokal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sidoarjo. Sistem makan sekolah *kyūshoku* di Jepang digunakan sebagai rujukan analitis berbasis literatur

untuk memperkaya interpretasi terhadap temuan penelitian. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan, interaksi antaraktor, serta konteks sosial dan kelembagaan yang memengaruhi pelaksanaan program di tingkat lokal (Creswell, 2014). Sementara itu, desain komparatif digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam praktik kebijakan pangan di lingkungan sekolah, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap efektivitas program (Neuman, 2014).

Lokasi penelitian difokuskan di Kabupaten Sidoarjo sebagai unit analisis utama, mengingat wilayah ini merupakan salah satu daerah implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merepresentasikan dinamika kebijakan di tingkat lokal. Adapun Jepang tidak dijadikan sebagai lokasi penelitian lapangan, melainkan sebagai rujukan konseptual melalui studi literatur terkait sistem *kyūshoku* yang telah lama dikenal sebagai praktik kebijakan makan sekolah yang terintegrasi, berkelanjutan, dan memiliki standar kualitas yang tinggi. Dengan demikian, penelitian ini menggabungkan data primer dari Sidoarjo dan data sekunder dari Jepang untuk menghasilkan analisis komparatif yang kontekstual.

Subjek penelitian terdiri dari aktor-aktor yang terlibat langsung dalam implementasi MBG di Kabupaten Sidoarjo. Informan dipilih secara purposive berdasarkan tingkat keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap program (Moleong, 2018). Informan utama meliputi pihak sekolah (kepala sekolah dan guru), pelaksana program atau penyedia makanan, pemerintah daerah atau dinas terkait, peserta didik sebagai penerima manfaat, serta orang tua atau wali murid. Apabila diperlukan, teknik *snowball sampling* digunakan untuk menjangkau informan tambahan berdasarkan rekomendasi informan awal guna memperkaya data penelitian (Denzin & Lincoln, 2018).

Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan di Kabupaten Sidoarjo. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memungkinkan peneliti menggali informasi secara fleksibel sekaligus tetap terarah pada fokus penelitian. Observasi digunakan untuk melihat secara langsung proses implementasi program, seperti mekanisme distribusi makanan, keterlibatan aktor, serta kondisi pelaksanaan di sekolah. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi literatur, termasuk kebijakan terkait MBG, laporan pelaksanaan program, serta kajian akademik dan laporan internasional mengenai sistem *kyūshoku* di Jepang.

Rekrutmen partisipan dilakukan secara bertahap dan sepenuhnya bersifat sukarela. Sebelum pengumpulan data, peneliti terlebih dahulu memperoleh izin penelitian dari Universitas Brawijaya dan instansi terkait, kemudian mengajukan permohonan izin kepada sekolah serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi lokasi penelitian. Pihak sekolah dan SPPG hanya berperan sebagai fasilitator untuk menghubungkan peneliti dengan calon partisipan yang memenuhi kriteria penelitian, tanpa menentukan atau mewajibkan individu tertentu untuk berpartisipasi.

Selanjutnya, peneliti menghubungi calon partisipan secara langsung, menjelaskan tujuan, prosedur, manfaat, potensi risiko, serta hak-hak partisipan melalui Lembar Penjelasan Penelitian dan Persetujuan Setelah Penjelasan (PSP). Calon partisipan diberikan waktu yang cukup untuk mempertimbangkan keikutsertaannya dan diberi kesempatan mengajukan pertanyaan sebelum memutuskan. Partisipasi sepenuhnya bersifat sukarela, tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun pengaruh dari pihak sekolah, SPPG, maupun instansi lainnya. Penolakan untuk berpartisipasi atau keputusan mengundurkan diri sewaktu-waktu tidak akan memengaruhi hubungan partisipan dengan sekolah, SPPG, instansi terkait, maupun peneliti. Hanya partisipan yang telah memberikan persetujuan secara sukarela melalui *informed consent* yang akan diikutsertakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai

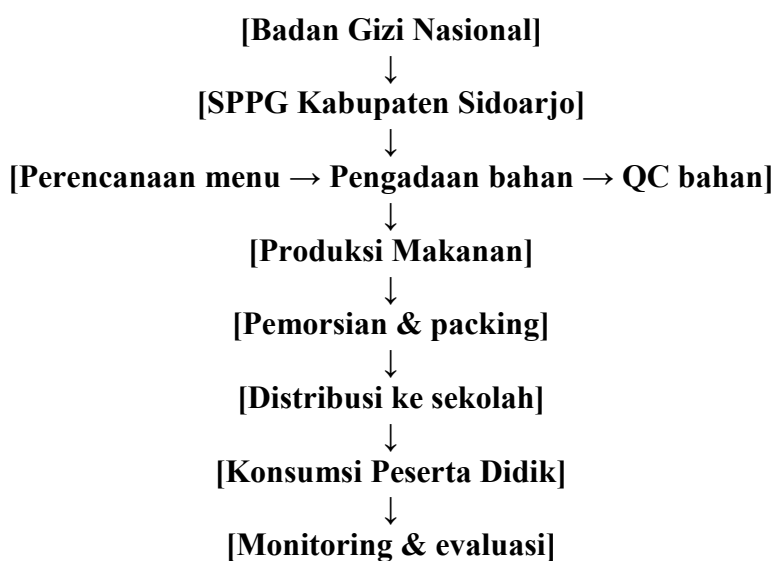
mekanisme implementasi program, koordinasi antaraktor, kendala pelaksanaan, serta persepsi pelaksana dan penerima manfaat. Observasi dilakukan untuk mengkonfirmasi data hasil wawancara sekaligus memahami konteks empiris yang tidak selalu terungkap melalui pernyataan informan. Dokumentasi digunakan sebagai sumber pendukung untuk memperkuat validitas data, khususnya dalam menelaah kebijakan, pedoman teknis, dan laporan program yang relevan (Miles et al., 2014).

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Pada tahap reduksi data, informasi yang diperoleh dari lapangan diseleksi dan dikategorikan berdasarkan tema-tema yang sesuai dengan kerangka analisis, yaitu food security dan human security. Pada tahap penyajian data, hasil penelitian disusun dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis agar memudahkan proses interpretasi dan perbandingan. Selanjutnya, pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti menghubungkan temuan empiris dengan kerangka teoretis untuk menjelaskan bagaimana implementasi MBG di Kabupaten Sidoarjo bekerja dalam konteks lokal serta bagaimana perbandingannya dengan praktik *kyūshoku* di Jepang sebagai rujukan konseptual.

Dalam konteks studi komparatif, analisis difokuskan pada aspek-aspek utama yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan keamanan insani, seperti ketersediaan pangan, akses distribusi, kualitas konsumsi, keberlanjutan program, perlindungan terhadap penerima manfaat, serta pemberdayaan aktor lokal. Dengan demikian, perbandingan tidak dilakukan secara langsung antar lokasi lapangan, melainkan melalui pendekatan analitis yang mengaitkan temuan empiris di Sidoarjo dengan praktik ideal yang tercermin dalam sistem *kyūshoku* di Jepang.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan yang berbeda, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan mengombinasikan wawancara, observasi, dan dokumentasi (Denzin & Lincoln, 2018). Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan temuan yang kredibel, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN



Sumber: Diolah peneliti berdasarkan hasil wawancara, Agustus 2026

Gambar 2. Flow Implementasi MBG

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sidoarjo, khususnya pada SPPG Gedangan, dilaksanakan melalui mekanisme operasional yang cukup terstruktur. Kepala SPPG menjelaskan bahwa proses dimulai dari penyusunan menu mingguan oleh ahli gizi, chef, dan admin, dengan acuan *master menu* sebanyak 20 menu. Setelah menu difinalkan, dilakukan pemesanan bahan pangan kepada pemasok, terutama untuk komoditas yang membutuhkan waktu pengadaan lebih lama. Setiap bahan yang datang wajib ditimbang, dicatat, dicocokkan dengan surat jalan, dan diperiksa kualitasnya dan bahan yang tidak sesuai standar akan langsung diretur.

Pada tahap produksi, dapur SPPG Gedangan dibagi ke dalam lima divisi, mulai dari persiapan, pengolahan, pemorsian, distribusi, hingga pencucian. Proses masak dilakukan dalam tiga *batch* masing-masing sekitar 1.000 porsi agar makanan tetap segar dan aman dikonsumsi. Pelaksana juga menetapkan batas waktu aman konsumsi maksimal enam jam sejak makanan matang, sedangkan makanan yang diterima di sekolah harus habis dalam waktu dua jam. Jika melewati batas tersebut, makanan ditarik kembali. Distribusi dijalankan setiap hari menggunakan kendaraan yang wajib dibersihkan sebelum dan sesudah pengiriman.



Sumber: Diolah peneliti berdasarkan hasil wawancara dan analisis peneliti, 2026

Gambar 3. Struktur Aktor Implementasi

Aktor yang terlibat dalam implementasi MBG meliputi Badan Gizi Nasional, SPPG sebagai pelaksana lapangan, korcama sebagai penghubung pendataan dan pembagian penerima manfaat, sekolah sebagai mitra penerima, serta supplier lokal sebagai penyedia bahan pangan. Koordinasi dengan sekolah dilakukan melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) yang mengatur tanggung jawab masing-masing pihak, termasuk jika terjadi kondisi mendesak atau permasalahan operasional. Radius pelayanan juga dibatasi sekitar enam kilometer atau dua puluh menit tempuh dari dapur ke sekolah.

Analisis Implementasi MBG dalam Perspektif *Human Security*

Tabel 2. Variabel Human Security (UNDP)

Dimensi	Temuan Lapangan	Implikasi
<i>Protection</i>	QC bahan, SOP produksi, batas aman konsumsi, retur bahan yang tidak layak	Menjaga keamanan pangan peserta didik atau penerima manfaat
<i>Empowerment</i>	Pelibatan SPPG, korcama, sekolah, supplier lokal, dan masyarakat	Memperkuat partisipasi dan kapasitas aktor lokal

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan UNDP (1994), United Nations (2009), dan hasil wawancara dengan informan penelitian

Dalam kerangka *human security*, implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sidoarjo dapat dibaca melalui dua dimensi utama, yaitu *protection* dan *empowerment*. Pada proposal penelitian, *protection* dijelaskan sebagai perlindungan negara atau institusi terhadap ancaman yang dapat mengganggu kebutuhan dasar manusia, sedangkan *empowerment* dimaknai sebagai penguatan kapasitas individu dan komunitas agar mampu

menghadapi kerentanan secara mandiri. Keduanya dipakai untuk membaca bagaimana MBG tidak hanya menyalurkan makanan, tetapi juga menjamin pemenuhan hak dasar atas pangan yang layak dan mendorong keterlibatan aktor lokal dalam pelaksanaannya.

Dari sisi *protection*, hasil wawancara menunjukkan bahwa perlindungan dilakukan melalui pengawasan mutu bahan pangan, pengendalian proses produksi, serta pembatasan waktu aman konsumsi. Setiap bahan yang masuk ke dapur SPPG wajib ditimbang, dicatat, dicocokkan dengan surat jalan, dan diperiksa kualitasnya; bahan yang tidak sesuai standar langsung diretur. Untuk menjaga kualitas bahan dari lokasi yang lebih jauh, distribusi diwajibkan memakai *cooler box* atau pendingin lain. Dalam proses produksi, dapur dibagi ke dalam lima divisi dan makanan dimasak dalam tiga *batch* agar tetap segar. Narasumber juga menegaskan bahwa makanan matang hanya aman dikonsumsi maksimal enam jam dan harus habis di sekolah dalam waktu dua jam; jika melewati batas, makanan ditarik kembali. Mekanisme ini menunjukkan bahwa perlindungan pada MBG tidak berhenti pada penyediaan makanan, tetapi hadir sebagai kontrol atas keamanan pangan hingga tahap konsumsi peserta didik.

Sementara itu, temuan mengenai pelibatan berbagai aktor dalam rantai implementasi menunjukkan adanya partisipasi multipihak yang dapat dibaca sebagai salah satu unsur dalam dimensi empowerment. Implementasi MBG di Gedangan melibatkan Badan Gizi Nasional, SPPG sebagai pelaksana lapangan, korcam sebagai penghubung pendataan dan pembagian penerima manfaat, sekolah sebagai mitra penerima, dan supplier lokal sebagai penyedia bahan pangan. Koordinasi dengan sekolah tidak bersifat informal, melainkan diikat melalui *Memorandum of Understanding* yang mengatur tanggung jawab masing-masing pihak, termasuk mekanisme saat terjadi kondisi mendesak. Di sisi lain, narasumber juga menyebut bahwa program memberi efek ke masyarakat sekitar karena supplier lokal ikut bergerak, warung di sekitar dapur mengalami peningkatan aktivitas, dan limbah makanan tertentu dimanfaatkan oleh peternak. Ini memperlihatkan bahwa MBG bukan hanya instrumen bantuan gizi, tetapi juga ruang kolaborasi yang memperkuat kapasitas kelembagaan dan ekonomi lokal.

Analisis Implementasi MBG dalam Perspektif *Food Security*

Tabel 3. Variabel Food Security (FAO)

Dimensi	Temuan Lapangan	Implikasi
<i>Availability</i>	Menu mingguan, <i>master menu</i> , pemesanan awal, pemeriksaan bahan	Ketersediaan pangan lebih terjamin
<i>Access</i>	Radius 6 km, MoU dengan sekolah, penyesuaian jadwal distribusi	Akses penerima manfaat lebih tertata dan jelas
<i>Utilization</i>	<i>Cooler box</i> , QC bahan, <i>batch cooking</i> , batas aman konsumsi	Pangan lebih aman dan terjamin bergizi saat dikonsumsi
<i>Stability</i>	Distribusi harian, kerja 24 jam, namun kapasitas dapur terbatas	Program stabil di operasional, tetapi belum merata sepenuhnya

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan konsep food security FAO (2008) dan hasil wawancara penelitian.

Dalam penelitian ini, implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dianalisis melalui empat dimensi *food security* yang digunakan dalam operasionalisasi variabel, yaitu *availability*, *access*, *utilization*, dan *stability*. Keempat dimensi tersebut dipakai untuk membaca apakah program benar-benar menyediakan pangan yang cukup, menjangkau penerima manfaat secara layak, dimanfaatkan secara aman dan bergizi, serta mampu berjalan secara berkelanjutan. Pada proposal penelitian, dimensi ini memang sudah dirumuskan secara eksplisit sebagai indikator yang menghubungkan implementasi program dengan ketahanan pangan peserta didik.

Dari sisi *availability*, hasil wawancara menunjukkan bahwa ketersediaan pangan dijaga melalui perencanaan menu mingguan yang disusun oleh ahli gizi, chef, dan admin dengan

acuan *master menu* sebanyak 20 menu. Setelah menu ditetapkan, pemesanan bahan dilakukan lebih awal, terutama untuk komoditas tertentu seperti ayam yang membutuhkan pengadaan dua hari sebelumnya. Bahan yang datang juga wajib ditimbang, dicatat, dan dicocokkan dengan surat jalan serta nota pemesanan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan tidak berjalan secara spontan, tetapi dirancang melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang cukup disiplin.

Pada dimensi *access*, implementasi MBG di Gedangan memperlihatkan bahwa akses pangan ditentukan oleh sistem distribusi yang terorganisasi. Korcam berperan membagi penerima manfaat per dapur sesuai radius pelayanan, dengan ketentuan radius maksimal sekitar 6 kilometer atau sekitar 20 menit tempuh dari dapur ke sekolah. Sebelum distribusi dimulai, dapur juga melakukan koordinasi awal dengan sekolah melalui MoU yang mengatur keterikatan pelaksanaan, tanggung jawab apabila ompreng hilang, dan mekanisme koordinasi jika muncul kondisi mendesak. Bahkan, pada sekolah dengan jam belajar bergantian, jadwal pengiriman disesuaikan agar semua siswa tetap menerima makanan dalam jam aman konsumsi.

Dimensi *utilization* tampak jelas dari upaya menjaga kualitas gizi dan keamanan makanan. Narasumber menjelaskan bahwa bahan pangan yang datang dari luar wilayah diwajibkan memakai *cooler box* atau alternatif pendingin lain untuk menjaga mutu bahan. Setiap bahan diperiksa oleh tim gizi, asisten lapangan, dan akuntan sehingga bahan yang tidak sesuai standar langsung diretur. Dalam proses produksi, makanan dimasak dalam tiga *batch* agar tetap *fresh food*, dan waktu aman konsumsi dibatasi maksimal enam jam sejak matang. Setelah tiba di sekolah, makanan harus habis dalam waktu dua jam, dan bila terlambat maka makanan ditarik kembali. Mekanisme ini menunjukkan bahwa pemanfaatan pangan tidak hanya soal makanan tersedia, tetapi juga bagaimana makanan tersebut tetap layak, aman, dan memberi manfaat gizi ketika dikonsumsi peserta didik.

Sementara itu, dimensi *stability* terlihat dari konsistensi pelaksanaan yang berlangsung setiap hari dan terus-menerus. Narasumber menyebut bahwa dapur bekerja tanpa henti selama 24 jam dengan pembagian divisi yang jelas, dan distribusi dilakukan setiap hari. Namun stabilitas program juga masih dibatasi kapasitas: setiap dapur hanya mampu melayani sekitar 2.500 porsi, sehingga masih ada sekolah yang belum kebagian layanan karena kuota penuh. Di sisi lain, pelaksana berupaya mencari solusi bersama sekolah agar distribusi tetap berjalan sesuai kebutuhan. Temuan menunjukkan adanya konsistensi operasional dalam periode yang diamati, tetapi pemerataan layanan masih menghadapi keterbatasan kapasitas dapur. Sehingga keempat dimensi *food security* bekerja secara bersamaan yang mana pangan tersedia, tersalurkan, aman dikonsumsi, dan dijalankan secara berkelanjutan. Namun, tantangan utama masih berada pada kapasitas cakupan layanan agar stabilitas yang sudah baik pada level dapur dapat bertransformasi menjadi stabilitas yang merata pada level seluruh sekolah sasaran.

Sintesis *Human Security*, *Food Security*, dan *Kyushoku*

Gambar 4.1 Flow Implementasi MBG



Gambar 4.2 Struktur Aktor Implementasi



Tabel 4.1 Protection–Empowerment

Dimensi	Temuan Lapangan	Implikasi
Protection	- QC bahan pangan - SOP produksi dan distribusi - Batas aman konsumsi (maks. 6 jam) - Makanan harus habis dalam 2 jam di sekolah - Retur bahan yang tidak layak	Menjaga keamanan pangan dan melindungi hak dasar peserta didik atas makanan yang aman dan bergizi.
Empowerment	- Pelibatan SPPG, korcam, sekolah, supplier lokal - Molli dengan sekolah - Peningkatan ekonomi lokal - Pemanfaatan limbah oleh peternak - Penguatan kapasitas aktor lokal	Memperkuat partisipasi dan kapasitas kelembagaan serta ekonomi lokal dalam implementasi MBG.

Tabel 4.2 Food Security

Dimensi	Temuan Lapangan	Implikasi
Availability	- Menu mingguan - Master menu (20 menu) - Pemesanan awal - Pemeriksaan bahan pangan	Ketersediaan pangan lebih terjangkau dan terencana.
Access	- Radius 6 km (±20 menit) - Molli dengan sekolah - Penyesuaian jadwal distribusi - Pembagian penerima manfaat oleh korcam	Akses penerima manfaat lebih tertata dan merata.
Utilization	- Cooler box untuk bahan segar - QC bahan oleh tim gizi - Batch cooking (3 batch) - Batas aman konsumsi - Makanan harus habis 2 jam	Pangan lebih aman, bergizi, dan layak dikonsumsi.
Stability	- Distribusi setiap hari - Kerja dapur 24 jam - Kapasitas per dapur ±2.500 porsi - Masih ada sekolah yang belum terlayani	Program stabil di level operasional, namun perlu penguatan kapasitas agar lebih merata.

Gambar 4.4 Model Implementasi Hasil Penelitian



Tabel 4.4 Output Penelitian

No.	Output	Deskripsi
1	Sistem implementasi MBG	Mekanisme operasional dari perencanaan hingga evaluasi
2	Keterlibatan aktor	Kolaborasi BGN, SPPG, korcam, sekolah, supplier lokal
3	Pemenuhan indikator <i>human security</i>	Protection dan empowerment berjalan simultan
4	Pemenuhan indikator <i>food security</i>	Availability, access, utilization, stability terpenuhi
5	Model implementasi	Integrasi temuan penelitian dalam satu model
6	Rekomendasi kebijakan	Penguatan kapasitas dan perluasan cakupan layanan

Gambar 4.3 Hubungan *Human Security*–*Food Security*



Tabel 4.3 Matriks Sintesis MBG–Kyushoku

Aspek	MBG (Indonesia)	Kyushoku (Jepang)
Tujuan	Peningkatan gizi peserta didik	Peningkatan gizi + pendidikan gizi
Regulasi	Juknis (masih berkembang)	Undang-Undang terintegrasi
Pelaksanaan	Fokus pada tata kelola operasional	Terintegrasi dengan Shokuiku
Aktor	Pemerintah, SPPG, sekolah, lokal	Pemerintah, sekolah, komunitas
Pembelajaran	Perlu penguatan regulasi, gizi, koordinasi	Model berkelanjutan dan holistik

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026.

Gambar 4. Sintesis Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sidoarjo memiliki logika yang sejalan dengan *Kyushoku* di Jepang, yakni sama-sama menempatkan makan sekolah sebagai instrumen peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pangan bergizi dan mengatasi masalah stunting. *Kyushoku* pada penelitian ini memang ditempatkan sebagai rujukan konseptual untuk memperkuat pembacaan terhadap MBG dalam kerangka *human security* dan *food security*. Alur pemikiran penelitian juga menegaskan bahwa analisis berangkat dari MBG di Sidoarjo, lalu dibaca melalui *Human Security*, *Food Security*, dan rujukan komparatif *Kyushoku* di Jepang.

Kesamaan paling utama terlihat pada tingkat kematangan tata kelola. MBG di Sidoarjo dianalisis sebagai kebijakan yang melindungi peserta didik melalui pemenuhan gizi, pengawasan mutu, dan penguatan kapasitas aktor lokal, sementara *Kyushoku* di Jepang dalam studi literatur juga dipahami bukan sekadar penyedia makanan bergizi, tetapi juga sebagai bagian dari pendidikan, keterlibatan komunitas, dan keberlanjutan sosial. Studi tersebut menegaskan bahwa *Kyushoku* tidak hanya fokus pada nutrisi, tetapi juga pada pendidikan gizi dan keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan (Auliawan & Harsiwi, 2025).

Perbedaannya terletak pada tingkat kematangan tata kelola. *Kyushoku* telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui *School Lunch Act 1954*, dengan pembagian biaya, subsidi pemerintah, dan penegasan bahwa program tersebut merupakan bagian dari pendidikan. Pada sisi lain, MBG di Indonesia masih berada pada tahap penguatan implementasi sehingga fokus utamanya masih pada tata kelola operasional, distribusi, dan perluasan cakupan layanan (Auliawan & Harsiwi, 2025).

Karena itu, sintesis dari temuan penelitian ini menunjukkan bahwa MBG sudah bergerak pada arah yang sama dengan *Kyushoku*, tetapi masih membutuhkan penguatan regulasi, koordinasi lintas aktor, dan aspek pendidikan gizi agar fungsi perlindungan dan pemberdayaan benar-benar berjalan berkelanjutan. Dalam kerangka penelitian, hal ini

mempertegas bahwa *human security* dan *food security* tidak berdiri sendiri, melainkan saling menguatkan dalam membentuk ketahanan pangan dan keamanan insani lokal.

Output Penelitian

Tabel 4. Output Penelitian

Output	Deskripsi
Sistem implementasi MBG	Rangkaian perencanaan, produksi, distribusi, dan evaluasi berjalan MBG
Keamanan pangan	QC bahan, retur bahan tidak layak konsumsi dan batas aman konsumsi
Kolaborasi aktor	Pemerintah daerah, BGN, SPPG, korcam, sekolah, dan supplier lokal
Dampak lokal	Aktivitas ekonomi sekitar dapur ikut bergerak
Sintesis penelitian	Output mengarah pada penguatan ketahanan pangan dan keamanan insani lokal

Sumber: Diolah peneliti, 2026.

Output penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi MBG di Kabupaten Sidoarjo menghasilkan keluaran langsung berupa tersedianya makanan bergizi bagi peserta didik melalui sistem operasional yang terstruktur, mulai dari perencanaan menu, pengadaan bahan, produksi, pemorsian, hingga distribusi ke sekolah. Seluruh proses tersebut dijalankan dengan pengawasan mutu bahan, pembatasan waktu aman konsumsi, dan koordinasi kelembagaan yang jelas sehingga makanan sampai ke penerima dalam kondisi layak.

Di tingkat kelembagaan, output berikutnya adalah terbentuknya pola kerja kolaboratif antara Badan Gizi Nasional, SPPG, korcam, sekolah, dan supplier lokal. Koordinasi ini diperkuat melalui MoU dengan sekolah dan pembagian radius pelayanan yang membuat distribusi lebih tertata. Di sisi lain, program juga memberi efek ekonomi lokal karena supplier, warung sekitar dapur, serta pemanfaatan limbah makanan oleh peternak ikut bergerak. Pada akhirnya, output MBG tidak berhenti pada penyaluran makanan, tetapi juga membentuk aktivitas ekonomi dan relasi kerja baru di sekitar lokasi pelaksanaan. Dan tujuan penelitian ini adalah menempatkan MBG sebagai kebijakan publik untuk membaca ketahanan pangan dan keamanan insani lokal di Kabupaten Sidoarjo.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, telah dijalankan melalui mekanisme yang relatif terstruktur dan melibatkan banyak aktor. Proses pelaksanaan dimulai dari perencanaan menu oleh ahli gizi, chef, dan admin dengan acuan *master menu*, kemudian berlanjut pada pengadaan bahan pangan, pemeriksaan kualitas bahan, produksi makanan, pemorsian, distribusi ke sekolah, hingga pengawasan pelaksanaan di lapangan. Seluruh tahapan tersebut dijalankan dengan pembagian divisi yang jelas dan koordinasi melalui MoU dengan sekolah serta pembatasan radius layanan yang ditetapkan dari dapur ke sekolah penerima manfaat.

Dari perspektif *human security*, MBG memperlihatkan dua fungsi utama. Pertama, dimensi *protection* tercermin pada pengawasan mutu bahan pangan, penolakan bahan yang tidak layak, penggunaan pendingin untuk menjaga kualitas bahan dari luar wilayah, pembagian kerja dapur, serta pembatasan waktu aman konsumsi agar makanan tetap aman dikonsumsi peserta didik. Mekanisme ini menegaskan bahwa perlindungan dalam MBG tidak hanya hadir dalam bentuk penyediaan makanan, tetapi juga melalui jaminan keamanan pangan sampai makanan diterima dan dikonsumsi. Kedua, dimensi *empowerment* tampak dari keterlibatan korcam, sekolah, supplier lokal, serta masyarakat sekitar dalam rantai implementasi. Program ini juga memunculkan efek ekonomi lokal, seperti meningkatnya aktivitas supplier, warung sekitar dapur, dan pemanfaatan limbah makanan oleh peternak.

Dari perspektif *food security*, penelitian ini menemukan bahwa MBG telah memenuhi empat dimensi utama. *Availability* terlihat dari perencanaan menu mingguan dan pengadaan

bahan yang dilakukan lebih awal. *Access* diwujudkan melalui sistem distribusi yang diatur berdasarkan radius pelayanan serta koordinasi dengan sekolah. *Utilization* tampak pada kontrol mutu, penggunaan *cooler box*, pengolahan *batch*, dan pembatasan waktu aman konsumsi. Sementara itu, *stability* menunjukkan bahwa program berjalan rutin setiap hari, tetapi masih menghadapi keterbatasan kapasitas dapur sehingga belum semua sekolah dapat terlayani secara merata. Dengan demikian, MBG sudah bekerja sebagai instrumen ketahanan pangan peserta didik, meskipun dari sisi cakupan masih memerlukan penguatan kelembagaan dan penambahan kapasitas layanan.

Jika dibandingkan dengan Kyushoku di Jepang, MBG memiliki arah yang sejalan, yaitu menjadikan makan sekolah sebagai instrumen peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi. Namun, Kyushoku telah berkembang lebih matang karena didukung regulasi yang kuat dan integrasi dengan pendidikan gizi *Shokuiku*, sedangkan MBG masih berada pada tahap penguatan tata kelola operasional dan perluasan cakupan. Oleh karena itu, pembelajaran penting dari Kyushoku adalah perlunya regulasi yang berkelanjutan, pendidikan gizi, serta koordinasi lintas sektor agar MBG dapat berkembang sebagai kebijakan yang berkelanjutan dan benar-benar memperkuat ketahanan pangan serta keamanan insani lokal.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program distribusi makanan, melainkan instrumen kebijakan publik yang beririsan langsung dengan *human security* dan *food security*. Melalui perlindungan gizi, penguatan aktor lokal, serta pengaturan sistem distribusi yang disiplin, MBG memiliki potensi besar untuk menjadi kebijakan yang tidak hanya memberi makan peserta didik, tetapi juga membangun ketahanan pangan dan keamanan insani di tingkat daerah (Auliawan & Harsiwi, 2025).

REFERENSI

- Aji, W. T. (2025). Makan bergizi gratis di era Prabowo-Gibran: Solusi untuk rakyat atau beban baru? *NAAFI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(3), 215–226.
- Akiyama, T., et al. (2025). Trends in national-level school feeding policy objectives worldwide: Japan and multiple countries. *Tropical Medicine and Health*, 53, 172.
- Asakura, K., & Sasaki, S. (2017). School lunches in Japan: Their contribution to healthier nutrient intake among elementary-school and junior high-school children. *Public Health Nutrition*, 20(9), 1523–1533.
- Auliawan, A. G., & Ratna, M. P. (2024). Strategi *Cool Japan* yang baru untuk menyelamatkan pertumbuhan ekonomi dan citra populer Jepang di era digital. *Jurnal Kiryoku*, 8(2), 590–604.
- Borovoy, A., & Roberto, C. A. (2015). Japanese and American public health approaches to preventing population weight gain: A role for paternalism? *Social Science & Medicine*, 143, 62–70.
- Cafiero, C., Viviani, S., & Nord, M. (2018). Food security measurement in a global context: The food insecurity experience scale. *Measurement*, 116, 146–152.
- CISDI. (2025). *Soroti makan bergizi gratis, CISDI bagikan catatan kritis mengenai tata kelola dan regulasi program*.
- CNN Indonesia. (2025). *Hasil pertemuan Prabowo-PM Jepang: Bantu MBG hingga beri pinjaman*.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W. (2024). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). SAGE Publications.

- Fatmawati, A. (2025). Analisis dampak program makan bergizi gratis (MBG) terhadap konsentrasi dan kedisiplinan belajar siswa SD. *JIPSD: Jurnal Inovasi Pendidikan Sekolah Dasar*, 2(2), 125–137.
- Febrian, B. (2018). *Analisis indikator ketahanan pangan di Kabupaten Sidoarjo* [Disertasi doctoral, Universitas Brawijaya].
- Food and Agriculture Organization. (2008). *An introduction to the basic concepts of food security*. FAO.
- Government of Japan. (2025). *The significance and evolution of Japan's school lunch program*.
- Herdiana, D. (2025). Implementasi kebijakan makan bergizi gratis (MBG): Faktor-faktor pendorong dan penghambat. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(2), 470–478.
- Ishida, H. (2018). The history, current status, and future directions of the school lunch program in Japan. *The Japanese Journal of Nutrition and Dietetics*, 76(Supplement), S2–S11.
- Izumi, H. (2020). Relationship between elementary school meals and communities: Examining school lunch systems and dietary education. *Japanese Journal of Human Geography*, 72(4), 403–422.
- JETRO. (2025). *Gakkō kyūshoku no mushō teikyō puroguramu kaishi*.
- Kompas. (2025). *Menelaah protes pelajar Papua terhadap program MBG*.
- Krisanthi, K. Y., & Widiastika, I. W. W. C. (2024). Nilai-nilai yang terkandung dalam implementasi budaya *kyuushoku* (makan siang di sekolah). *Jurnal Daruma: Linguistik, Sastra dan Budaya Jepang*, 4(2).
- MAFF. (2025). *Shokuikukihonhō shokuikusuishin kihon keikaku-tō*.
- Mann, J., Cummings, J. H., Englyst, H. N., Key, T., Liu, S., Riccardi, G., & Wiseman, M. (2007). FAO/WHO scientific update on carbohydrates in human nutrition: Conclusions. *European Journal of Clinical Nutrition*, 61(1), S132–S137.
- Maruyama, S., & Kurokawa, A. (2018). The operation of school lunches in Japan: Construction of a system considering sustainability. *The Japanese Journal of Nutrition and Dietetics*, 76(Supplement), S12–S22.
- Masaki, Y. (2025). *Nihon no shokuiku kyūshoku puroguramu no honshitsu*.
- MEXT. (2009). *Gakkō kyūshoku no shinkō*.
- MEXT. (2011). *Research study collaborator conference on formulation of dietary reference intake of school children in school lunch program: Formulation of the school lunch intake standards*.
- MEXT. (2012). *Shokuiku tte nani?*
- MEXT. (2024). *Gakkō kyūshoku ni kansuru jittai chōsa*.
- MHLW. (2022). *Dai 4-ji shokuiku suishin kihon keikaku*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.
- Nakamura, T. (2005). *Shokuseikatsu to eiyo no hakkajiten*. Maruzen Publishing.
- Nazir, M. (2013). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (7th ed.). Pearson Education Limited.
- Ong, S. (2020). *Seikatsu kaizen: Reformasi pola hidup Jepang*. Elex Media Komputindo.
- Prasetyarini, F. D., Mustadjab, M. M., & Hanani, N. (2014). Analisis penyediaan pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Sidoarjo. *Agricultural Socio-Economics Journal*, 14(3), 205–213.
- Purwowidhu, C. (2025). *Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Dinamika dan sorotan*. Media Keuangan.

- Qomarrullah, R. I., Suratni, S., & Sawir, M. (2025). Dampak jangka panjang program makan bergizi gratis terhadap kesehatan dan keberlanjutan pendidikan. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 5(2), 130–137.
- Rahmah, H. A., Anggraini, A., Nilasari, Y. P., & Salsabilla, E. P. (2025). Analisis efektivitas program makan bergizi gratis di sekolah dasar Indonesia tahun 2025. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(2), 2855–2866.
- Rustianingsih, E. (2024). Evaluation of the food security program in Sidoarjo Regency. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 12(2), 155–165.
- Setneg RI. (2025). *Mendukung terselenggaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua*.
- Sujarweni, V. W. (2024). *Metodologi penelitian*. Pustaka Baru Press.
- Susanti, A. F. (2019). Hubungan pendapatan dan status ketahanan pangan rumah tangga di wilayah pesisir Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. *Amerta Nutrition*, 3(2), 100–106.
- Tambunan, K. A. H., et al. (2025). Tinjauan kritis tentang program makan bergizi gratis terhadap produktivitas belajar siswa. *Katalis Pendidikan*, 2(2), 21–31.
- Tani, Y., Ochi, M., & Fujiwara, T. (2021). Association of nursery school-level promotion of vegetable eating with caregiver-reported vegetable consumption behaviours among preschool children: A multilevel analysis of Japanese children. *Nutrients*, 13(7).
- United Nations Development Programme. (1994). *Human development report 1994*. Oxford University Press.
- United Nations. (2009). *Human security in theory and practice*. United Nations.
- World Health Organization. (2020). *Healthy diet*.